

MENILAI KESIAPAN MIANGAS MERESPON DAMPAK AKTIVITAS TERORIS PRO-ISIS DI FILIPINA SELATAN

(ASSESSING READINESS OF MIANGAS IN RESPONDING THE IMPACTS OF PRO-ISIS TERRORIST ACTIVITIES IN SOUTH PHILIPPINES)

Poltak Partogi Nainggolan

(Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Nusantara II, Lantai 2, DPRRI,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia;
email: partogi.nainggolan@dpr.go.id; pptogin@yahoo.com)

Naskah Diterima: 31 Oktober 2017, direvisi: 28 November 2017,
disetujui: 14 Desember 2017

Abstract

An escalation of low intensity conflict and an awkward position of pro-ISIS terrorists groups because of President Duterte's military operation could bring implications to Miangas. The island in the most northern part of Indonesia which has boundary with the Philippines in its waters has been anticipated by the country's authorities as an evacuated route which can be used as a new military base for the Abu Sayyaf, Maute groups and other pro-ISIS groups, which will attract more foreign terrorist fighters to come. The research in Miangas analyses the level of security threats by making with various parties and field observation by applying both traditional and non-traditional approaches. Field research conducted in January-July 2017 by adopting qualitative methodology in its data analysis. Its findings reveal vulnerabilities in Miangas from possible terrorist acts of pro-ISIS groups in South Philippines and the development of the low intensity conflicts. Although Miangas people has strong potentials to respond the threat, problem of connectivity of Miangas and other Indonesia's islands, poor infrastructure and the absence of main weapons, as well as low discipline and mentality of the state and security apparatus there will their capability to quick and effectively respond every pro-ISIS terrorist attacks from the South Philippines.

Keywords: *terrorism, ISIS, FTFs, South Philippines, Miangas, safe haven*

Abstrak

Eskalasi konflik berskala rendah dan terdesaknya kelompok-kelompok teroris pro-ISIS di Filipina Selatan oleh operasi militer Presiden Duterte dapat membawa dampak ke Miangas. Pulau terdepan Indonesia yang perairannya berbatasan langsung itu diantisipasi aparat Indonesia dapat dijadikan tempat pelarian dan basis persembunyian baru Kelompok Abu Sayyaf, Maute dan pro-ISIS lain, dengan kehadiran teroris asal mancanegara. Penelitian ini menganalisis sejauh mana ancaman yang ada, dengan mewawancarai banyak pihak dan melakukan observasi lapangan, dengan memakai perspektif keamanan tradisional dan jnon-tradisional. Penelitian dilakukan selama Januari-Juni 2017, dengan menggunakan metodologi kualitatif dalam analisis datanya. Temuan penelitian mengungkapkan kerawanan Pulau Miangas dari berbagai kemungkinan ancaman serangan terorisme pengikut ISIS di Filipina Selatan dan perkembangan konflik berskala rendah di sana. Sekalipun terdapat potensi penduduk untuk menangkalnya, namun hambatan konektivitas Pulau Miangas dengan pulau-pulau lain di Indonesia, keterbatasan infrastruktur dan ketidakterediaan alutsista, serta lemahnya mentalitas dan disiplin aparat pemerintahan dan keamanan di sana, akan menyulitkan mereka untuk dapat merespons secara cepat dan efektif setiap serangan terorisme para pengikut ISIS di Filipina Selatan.

Kata Kunci: *terorisme, ISIS, FTFs, Filipina Selatan, Miangas, safe haven*

PENDAHULUAN

Keberhasilan ofensif pasukan koalisi Barat dan Arab, serta Rusia, Iran dan Pemerintah Assad, yang anti-ISIS, telah membuat para pemimpin ISIS di Suriah dan Iraq harus merubah strategi perang mereka. ISIS kemudian tidak lagi menjadikan Suriah dan Iraq sebagai basis perjuangan, perlawanan dan kampanye terorisme internasional mereka.¹

¹ Edith M. Leder, "ISIS on defensive in conflict areas but adapting: UN chief," *The Jakarta Post*, February 8, 2017: 12.

Perang, serangan, dan markas komando ISIS tidak lagi berpusat di Suriah dan Irak, tempat ISIS dideklarasikan oleh Abu Bakar Al-Baghdadi. Karena, ISIS telah kehilangan banyak pengikut dan wilayah mereka, bersamaan dengan semakin menyusutnya secara drastis wilayah operasional yang mereka kontrol.

Dewasa ini, posisi pasukan ISIS semakin terpojok, akibat ofensif dan kepungan pasukan koalisi Barat, yang dipimpin AS, melibatkan militer Arab Saudi,

Qatar dan Kurdi. Juga, koalisi anti-ISIS yang dipimpin Rusia, melibatkan militer Iran dan rezim Bashar al-Assad, serta yang dilancarkan sepihak oleh Turki. Sebagai konsekuensinya, pasukan ISIS harus memindahkan basis-basis operasi dan meningkatkan kehadiran mereka ke wilayah terdekat, antara lain ke Libya dan Afrika Barat dan Sahel, seperti Nigeria dan Burkina Faso. Sementara, ke wilayah Timur Jauh, untuk membedakannya dengan Timur Dekat atau Timur-Tengah, pemimpin ISIS di Suriah dan Irak menoleh dan menjatuhkan pilihan ke kawasan Asia Tenggara, sebagai alternatif.

Keputusan ini harus diambil pemimpin ISIS di Suriah dan Irak untuk mencari dukungan baru dan mengonsolidasikan kekuatan mereka demi mencapai tujuan akhir: menegakkan khilafah untuk mewujudkan Kekhalifahan Islam, dengan aksi-aksi kekerasan dan terorisme mereka. Para pemimpin ISIS di bawah al-Baghdadi pun selanjutnya memutuskan akan membangun Kekhalifahan Islam di Timur Jauh, maksudnya Asia Tenggara, selain di tempat asalnya, untuk memperluas basis perlawanan. Pemimpin ISIS di Suriah dan Irak kemudian menyerukan kepada para pengikut, pendukung dan simpatisan mereka di berbagai belahan dunia untuk membangun dan melancarkan serangan dari wilayah asal mereka masing-masing sambil bekerja sama, melakukan komunikasi, dan menggunakan kontak dan jejaring dengan sel-sel lokal. Serangan terorisme secara langsung dan kontiniu oleh pelaku lama pengikut ISIS mantan petempur di Suriah dan Irak dan petempur asing (*Foreign Fighters Terrorists --FTFs*) membuat pemerintah di berbagai negara waspada untuk menghadapi ancaman dan aksi-aksi terorisme ISIS selanjutnya.

Perkembangan di atas memunculkan pertanyaan, bagaimana kemungkinan implikasi aktivitas para pengikut, pendukung dan simpatisan ISIS/IS di Filipina Selatan ke perbatasan laut Filipina dan Indonesia dan wilayah sekitarnya? Lalu, bagaimana respons dan kesiapan pemerintah pusat dan daerah, khususnya aparat keamanan dan pertahanan Indonesia, dalam menangani ancaman yang ditimbulkan dari berkembangnya ISIS/IS di kawasan Asia Tenggara? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu perlu dilakukan kunjungan ke lapangan, untuk pengamatan dan pengumpulan data secara langsung.

Penelitian ini bertujuan mengkaji implikasi yang dapat terjadi akibat perkembangan aktivitas dan dan mobilitas para pengikut dan pendukung teroris pro-ISIS yang meningkat di Filipina Selatan belakangan ini ke Pulau Miangas, perbatasan terluar Indonesia, yang berbatasan langsung di perairan dengan negara tetangga itu. Penelitian ini juga mengkaji kesiapan

aparat di Pulau Miangas untuk merespons ancaman terorisme yang datang dari ISIS sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis terkini yang terus berlangsung di sana

Penelitian Sebelumnya dan Telaah Literatur

Kajian terorisme modern terkait dengan munculnya dan eksistensi ISIS, masih terbatas. Beberapa bisa disebut di sini, baik dalam buku-buku maupun jurnal-jurnal ilmiah. Adapun buku-buku, yang membahas langsung mengenai ISIS adalah, antara lain, karya-karya Assad, Lister, Stern dan Berger.² Penelitian yang lebih khusus, di Poso, melihatnya dalam kaitan dengan konflik primordial dan kewilayahan, serta *bad governance* dalam pengelolaan wilayah dan resiko ancaman yang datang dari para pengikut, pendukung dan simpatisan ISIS di kemudian hari.³ Yang lebih kritis dan mendalam lagi, mencoba melihat hubungannya dengan kepentingan berbagai negara dalam menciptakan *proxy war* di baliknya, seperti dalam karya Mabon.⁴ Sedangkan yang membahas terorisme lihatnya dalam perspektif kawasan (Asia Tenggara), dengan alasan dan argumentasi khususnya, misalnya, terdapat dalam karya Singh, Acharya, serta Kleinen dan Osseweijer.⁵

Dari kalangan pembuat dan pelaksana kebijakan, PM Singapura, Lee Hsien Loong, adalah termasuk pemimpin yang sejak dini telah mengantisipasi kehadiran “kekhilafahan jauh” ISIS, sebagai “wilayah satelit” Daesh di Timur-Tengah. Pada Mei 2015, ia mengungkapkan bahwa Asia Tenggara telah dijadikan “basis rekrutmen kunci” ISIS, sehingga ancaman yang muncul tidak lagi di Timur-Tengah, khususnya Suriah dan Irak, namun justru di kawasan ini, pasca-serangan gencar pasukan koalisi internasional ke pusat-pusat perjuangan ISIS di sana.⁶ Pilihan pemimpin

² Muhammad Haidar Assad (2014), *ISIS: Organisasi Teroris Paling Mengerikan Abad Ini*, Jakarta: Zahira; Charles R. Lister (2015), *The Syrian Jihad*, Oxford: Oxford University Press; dan Jessica Stern and J.M. Berger (2015), *ISIS: The State of Terror*, Ecco: William and Collins.

³ Lihat, Dave McRae (2015), *Poso: Sejarah Komprehensif Kekerasan Antar Agama Terpanjang di Indonesia Pasca-Reformasi*, Jakarta: Marjin Kiri; Carlyle A Thayer (2016), “Southeast Asia’s Regional Autonomy under Stress,” *Asian Affairs*, Singapore: ISEAS.

⁴ Simon Mabon (2016), *Saudi Arabia and Iran: Power and Rivalry in the Middle East*, London and New York: IB Tauris.

⁵ Lihat, Daljit Singh (2009), *Terrorism in South and Southeast Asia in the Coming Decade*, Singapore: ISEAS; Amitav Acharya (2012), *The Making of Southeast Asia: International Relations of a Region*, Singapore: ISEAS; John Kleinen and Manon Osseweijer (2010), *Pirates, Ports, and Coasts in Asia: Historical and Contemporary Perspectives*, Singapore: ISEAS.

⁶ Prashanth Parameswaran, “Singapore Warns of Islamic

ISIS di pusat bukan kebetulan, karena kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang subur dan menyediakan kondisi yang kondusif bagi terorisme untuk berkembang. Kawasan ini diperkirakan akan jauh lebih mudah dikontrol oleh para tokoh ISIS/IS di kawasan, dan juga dari pusatnya, di Timur-Tengah. Karena itulah, PM Lee menyatakan kehadiran ISIS akan menciptakan ancaman yang serius bagi seluruh negara dan kawasan Asia Tenggara.⁷

Dalam karya Abimanyu dan Ali, telah dibahas tentang tentang embrio ISIS, yakni kelompok Al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah, pengikut dan pendukungnya di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Filipina, serta Asia Tenggara dalam perspektif lebih luas (kawasan).⁸ Sedangkan dalam jurnal-jurnal ilmiah, telah ada kajian yang kritis mengenai terorisme (internasional), walaupun belum menyebut secara langsung dan mendalam (khusus) mengenai aksi-aksi ISIS melalui kemunculan dan eksistensinya dalam hubungan internasional, terutama sebagai isu dalam keamanan internasional, termasuk yang membahas dalam perspektif kepentingan dan ancaman AS. Beberapa di antaranya adalah tulisan Neumann, White, Jones dan Smith serta Kim dan Lee.⁹ Yang membahas secara langsung mengenai sepak terjang dan ancaman ISIS di kawasan Asia Tenggara adalah karya-karya dalam buku dan jurnal ilmiah, antara lain, milik Samuel, Li Wei, Ramakhrisna, dan Gunaratna.¹⁰

State Base in Southeast Asia," *The Diplomat*, 30 May 2015, <http://thediplomat.com/2015/05/singapore-warns-of-islamic-state-base-in-southeast-asia>, diakses pada 27 Februari 2016 oleh Thomas Koruth Samuel, dalam *Radicalisation in Southeast Asia: A Selected Case Study of Deash in Indonesia, Malaysia, and the Philippines*, Malaysia: SEARCCCT, 2016: 8.

⁷ Rohan Gunaratna, "Islamic State branches in Southeast Asia," *Pacific Forum*, CSIS, Number 7, 19 January 2016, http://csis.org/files/publication/160119_PacNet_1607.pdf, diakses pada 27 February 2016, seperti dikutip Thomas Koruth Samuel, *ibid*.

⁸ Bambang Abimayu (2006), *Teror Bom Azahari-Noor Din*. Jakarta: Penerbit Republika; As'ad Said Ali (2014), *Al-Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya*, Jakarta: LP3ES.

⁹ Lihat, Peter R Neumann (2013), *Options and Strategies for Countering Online Radicalization in the United States*. London: King's College; Jonathan R White (2012). *Terrorism and Homeland Security*. USA: Wadsworth; David Martin Jones dan MLR Smith (2012), "Organization vs. Ideology: The Lessons from Southeast Asia," dalam *Current Trends in Islamist Ideology*, Vol. 12. Washington DC: Hudson Institute: 92-123; Lihat pula, Kim Hyung Jong K and Lee Poh Ping (2011), "The Changing Role of Dialogue in the International Relations of Southeast Asia," dalam *Asian Survey* (Sept/Oct), 51.5. Berkeley (Sep/Oct): 953-970.

¹⁰ Thomas Koruth Samuel (2016), *Radicalisation in Southeast Asia: A Selected Case Study of Deash in Indonesia, Malaysia, and the Philippines*, Malaysia: SEARCCCT; Li Wei (2015), "Near ISIS Threat --Islamic State of Irap and al-Sham seeks

Pakar terorisme di kawasan, Rohan Gunaratna, memperkirakan ISIS telah sungguh-sungguh menunjukkan keinginannya mendirikan paling tidak satu Provinsi ISIS di Asia di tahun 2016. Ia melihat jika ISIS dapat mendirikan basis di kawasan Asia Tenggara, ISIS akan memberi implikasi keamanan lebih jauh terhadap masa depan stabilitas dan kemakmuran Asia yang tengah bangkit ekonominya, sehingga tidak boleh dianggap remeh. Gunaratna bahkan telah melihat Filipina, khususnya Mindanao, sebagai episentrum aktivitas ISIS di kawasan Asia Tenggara. Mindanao, wilayah di selatan Filipina, dengan lebih banyak penduduk miskin dan rendah pendidikannya dibandingkan dengan wilayah Filipina lainnya, kemungkinan besar akan diproklamasikan secara resmi sebagai *wilayat*, atau wilayah satelit ISIS.¹¹ Sehingga logis, sebagai dampak dari kehadiran Kekhalifahan ISIS di Asia Tenggara, muncul berbagai aksi terorisme pro-ISIS di negara-negara di kawasan ini.

Kelompok Muslim Moro di Mindanao, Filipina Selatan, sendiri dalam beberapa dasawarsa, tetap tidak bisa dieliminasi Pemerintah Filipina, khususnya kekuatan militernya. Gagasan pendirian sebuah negara Islam yang independen dari negara Filipina mendapat dukungan yang sangat kuat dari rakyat Muslim di wilayah Selatan tersebut dan para pengikut dan pendukung kelompok radikal, baik MNLF (*Moro National Liberation Front*) maupun MILF (*Moro Islamic Liberation Front*). Itulah sebabnya, pasca-pemberian otonomi kepada pemimpin Moro, Nur Misuari, yang kemudian menjadi gubernur di Mindanao, pemberontakan rakyat Moro di bawah kendali Kelompok Abu Sayyaf tetap berlangsung, yang kini dipimpin generasi yang lebih muda.¹²

Dengan terdesaknya ISIS di Timur-Tengah dan kembalinya para pejuang ISIS dari berbagai latarbelakang kewarganegaraan (FTFs) asal Indonesia, Malaysia, dan Filipina, yang telah diingatkan dan dikuatirkan oleh para pemimpin dunia akan mempercepat tercapainya ambisi pemimpin ISIS di pusat. Karena itu, kembalinya mereka akan memberi ancaman serius kepada kawasan negara-negara mereka berasal dan semula tinggal. Penelitian atau analisis mengenai implikasi meningkatnya aktivitas

to extend its presence to Central Asia and beyond," Beijing Review, Beijing; Kumar Ramakrishna (2017), "The Growth of ISIS Extremism in Southeast Asia: Its Ideological and Cognitive Features --and Possible Policy Responses," *New England Journal of Public Policy*, Volume 29, Issue 1, Article 6, Singapore: Nanyang Technological University, 2017; Kumar Ramakrishna (2016), "Contemporary Southeast Asia, 38.3. Singapore: 495-522; serta Rohan Gunaratna (2016), "Islamic State branches in Southeast Asia," *Pacific Forum*, CSIS, Number 7, 19 January.

¹¹ *Ibid*.

¹² Wawancara dengan perwira Densus 88, di Hotel Aryaduta, Jakarta pada 30 Maret 2017.

para pengikut dan pendukung ISIS di Filipina Selatan ke pulau terluar Indonesia Miangas serta kemungkinan infiltrasi dan tingkat ancaman yang datang dari aksi-aksi terorisme mereka belum ada yang melakukannya. Untuk tujuan itulah, penelitian ini dilakukan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan di perbatasan perairan Indonesia dengan Filipina di Kabupaten Kepulauan Talaud, terutama Pulau Miangas, yang berbatasan langsung dengan perairan Filipina Selatan. Wilayah ini tengah bergolak akibat pertempuran antara Kelompok Abu Sayyaf, Maute dan lain-lain yang pro-ISIS/IS, yang berupaya merebut Kota Marawi, melawan militer Pemerintah Filipina. Wilayah ini dipilih sebagai sampel wilayah penelitian karena letaknya di bagian terluar perbatasan Indonesia dengan wilayah Filipina Selatan. Selama ini, para pengikut ISIS menggunakan wilayah itu untuk akses atau pintu keluar-masuk ke Filipina dan Indonesia. Demikian pula, pengikut ISIS dari Kelompok Abu Sayyaf sering beroperasi di kedua wilayah perairan provinsi tersebut. Penelitian kepustakaan dilakukan mulai permulaan Januari 2017, sedangkan penelitian lapangan untuk observasi lapangan dan wawancara secara mendalam dijalankan pada Mei-Juni 2017.

Wawancara secara mendalam dilakukan dengan aparat Polres dan Polsek, Korem, Kodim, dan Koramil, Lanal dan Posal, pasukan Pengamanan Perbatasan (Pamtas), pasukan nonorganik Brimob dari Polda, serta Bupati dan Camat, yang tugas mereka juga terkait dengan pembinaan dan pengawasan pemerintahan, serta keamanan dalam negeri, termasuk masalah intelijen daerah. Kegiatan pengamatan langsung di lapangan dilakukan dengan kunjungan ke kawasan perbatasan darat dan perairan di Pulau Miangas, pulau terluar yang wilayah perairannya berbatasan langsung dengan wilayah Filipina Selatan melengkapi pengumpulan data yang telah dijalankan melalui wawancara secara mendalam.

Analisis data dilaksanakan melalui seleksi dan konfirmasi data. Data yang terseleksi dan valid kemudian digunakan untuk ditriangulasikan dan dianalisis secara kritis. Kegiatan triangulasi data dilakukan dalam perspektif metode dan sumber datanya. Data hasil studi kepustakaan, pengamatan lapangan dan yang diperoleh dari wawancara mendalam dilihat relevansinya. Baik aktivitas pengumpulan maupun analisis data dalam penelitian ini, keduanya secara menyeluruh menggunakan pendekatan kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Filipina Selatan sebagai Basis Baru ISIS

Aparat keamanan negara-negara di kawasan, terutama dalam lingkup ASEAN, telah melihat kehadiran Kekhalifahan ISIS/IS di kawasan Asia Tenggara, yang terus berproses pengembangannya. Sidney Jones, analis konflik dan terorisme internasional, berpendapat kekhalifahan ISIS tersebut bukanlah kekhalifahan baru, melainkan realisasi cita-cita dan perjuangan Jamaah Islamiyah (JI dan penerusnya, yang tetap berpusat di Indonesia. Adapun wilayah *mashriq* (wilayah timur) Daulah Islamiyah yang dulu direncanakan di Filipina Selatan, dalam penilaian Jones, telah gagal dibentuk.¹³

Indonesia telah dijadikan sebagai salah satu dari empat negara sasaran serangan ISIS dalam rangka pembentukan kekhalifahannya di kawasan Asia Tenggara.¹⁴ Setelah Aman (Oman) Abdurrahman, pemimpin ISIS Nusantara (Indonesia), pendiri Jamaah Ansharut Daulah (JAD), ditahan oleh aparat keamanan Indonesia akibat (sejarah) aksi-aksi terorismenya yang panjang sejak tahun 2003, pimpinan aktivitas terorisme pro-ISIS diambil-alih kaum muda. Abu Jandal, tokoh JAD Malang, Jawa Timur, yang tewas di Suriah pada tahun 2016, sebagai contoh, adalah penghubung ISIS di Suriah dan sekaligus petinggi ISIS di Indonesia, bersama-sama Santoso, tokoh Mujahidin Indonesia Timur (MIT), yang tewas di Poso Juli 2016. Bachrumsyah, petinggi JAD Jabodetabek, yang tewas di Suriah pada awal 2017, memainkan peran sebagai agitator ISIS Asia Tenggara. Lalu, Bachrun Naim alias AnggihTamtomo, alias Abu Rayan, yang juga murid Aman (Oman) Abdurrahman, yang telah "*hijrah*" ke Suriah sejak Mei 2014 untuk bergabung dengan ISIS, juga merupakan pemimpin ISIS/IS Asia Tenggara.¹⁵ Ketiga orang itu tengah berebut menjadi yang terbesar pengaruhnya dan diakui sebagai pemimpin ISIS tidak hanya di Indonesia, tetapi juga kawasan yang lebih luas, yaitu di Asia (Tenggara).¹⁶

Di Filipina (Selatan), pemimpin Kelompok Abu Sayyaf, Isnilon Totoni Hapilon, menunjukkan sepak terjangnya yang semakin berskala internasional, dengan aksi-aksi penculikan dan pembajakan kapal di perbatasan perairan Filipina Selatan dengan Sabah,

¹³ Penjelasan pakar konflik dan terorisme dari IPAC, Sidney Jones, atas pertanyaan tertulis, disampaikan pada 26 April 2017.

¹⁴ Laporan intelijen Uni Emirat Arab, diungkapkan oleh Kapolri Badrodin Haiti dan Kepala BIN, Sutiyoso. Lihat, Mitra Tarigan, "TNI Waspada Ancaman ISIS," *Koran Tempo*, 10 Nopember 2016: 9.

¹⁵ "Jejaring ISIS di Kampung Melayu," *Majalah Tempo*, 29 Mei-4 Juni 2017: 367-37.

¹⁶ Wawancara dengan Sidney Jones, analis keamanan dan terorisme internasional, Direktur the Institute for Policy and Analysis of Conflict (IPAC), di Jakarta, pada 4 April 2016.

Sulu, dan Indonesia, yang juga telah menjadikan Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai sasarannya. Kelompok Abu Sayyaf belakangan semakin mengontrol kawasan perairan yang berbatasan dengan Indonesia di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, yang memiliki pulau-pulau kecil terluar, di Kabupaten Sangir dan Kabupaten Talaud. Karena itulah, aksi-aksi pembajakan kapal dan penyanderaan awaknya, dengan meminta tebusan, yang dilakukan para pengikut kelompok itu terus meningkat.

Perkembangan ini, jika tidak dihentikan, akan membuat Kelompok Abu Sayyaf dan kelompok radikal Islam pendukungnya merajalela untuk menciptakan situasi anarkis lebih luas di wilayah perairan dan perbatasan terluar Filipina-Indonesia, yang sulit dikontrol aparat keamanan masing-masing pemerintahnya. Tidaklah mengherankan, aksi-aksi Kelompok Abu Sayyaf dalam melakukan pembajakan kapal dan penyanderaan Anak Buah Kapal (ABK) telah mempengaruhi instabilitas di perbatasan kedua negara tersebut.¹⁷ Kondisi ini dapat merongrong kewibawaan pemerintah pusat dan daerah di kedua negara.

Filipina Selatan semakin menarik perhatian dunia ketika pada 23 Mei 2017, Kelompok Maute yang telah berbaiat ke ISIS/IS melakukan serangan untuk menduduki Malawi, kota tua pusat kebudayaan Muslim. Malawi berpenduduk sekitar 200 ribu orang, 90 persen penduduknya Muslim, dan di tahun 1980 menyatakan diri sebagai "Kota Islam," satu-satunya di negara Filipina yang berpenduduk mayoritas Katholik.¹⁸ Kota yang semula damai ini berubah menjadi arena perang setelah Isnilon Tontoni Hapilon, pemimpin baru kelompok pro-ISIS/IS Abu Sayyaf, bersembunyi di sana dari incaran militer Filipina.

Kelompok Maute kemudian melakukan pembantaian terhadap kelompok minoritas Kristen di sana, dan juga Muslim yang tidak mendukungnya, apalagi memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas yang berusaha sembunyi. Serangan kelompok teroris Maute, dengan sekitar 500 pasukan mereka¹⁹ untuk menguasai kota ini, telah memprovokasi Presiden Filipina Duterte untuk menetapkan keadaan darurat militer selama 60 hari dan menggelar operasi militer besar-besaran untuk mencegah jatuhnya kota ini sebagai bagian dari Kekhalifahan ISIS di Asia Tenggara. Dalam seminggu perang di Marawi itu, sebanyak 120 orang Kelompok Maute, 19 rakyat sipil dan 20 anggota pasukan

keamanan Filipina telah tewas.²⁰ Dari 120 orang teroris Kelompok Maute yang tewas itu, 8 orang WNA atau FTFs, yakni masing-masing 2 orang WN Saudi Arabia, Malaysia, dan Indonesia, serta masing-masing 1 WN Yaman dan Chechnya.²¹ Sedangkan sebanyak 50-100 orang lagi anggota Kelompok Maute diperkirakan masih berada di Kota Marawi, dan lebih dari 300 orang sisanya, diperkirakan telah berpindah kota, di bagian lain negara Filipina.²²

Mindanao, Filipina Selatan, tempat berlokasinya Kota Malawi, yang telah menjadi medan perang baru ISIS/IS, hanya berjarak 48 mil laut dengan Pulau Miangas, yang pernah dikenal sebagai El-Palmas, di bawah pengaruh kolonialisme Spanyol. Sedangkan jarak Miangas ke Nanusa, kecamatan terdekat, hanya 145 mil laut. Pulau Miangas adalah wilayah terluar/terdepan atau paling utara Indonesia, bagian dari Kabupaten Kepulauan Talaud. Kondisi geografis ini memungkinkan terjadinya dampak sampingan dari konflik regional, dalam bentuk masuknya para FTFs dari dan ke Indonesia untuk membantu rekan mereka, keluar dari wilayah yang terkepung dan akan jatuh ke tangan militer Filipina. Sehingga, perbatasan perairan Indonesia dengan Filipina itu rawan dijadikan wilayah ataupun bagian dari basis ISIS di Asia Tenggara.

Kemunduran di Syria dan Irak telah membuka mata pimpinan ISIS di pusat untuk membuka mandala perang baru di Asia Tenggara.²³ Wilayah di Filipina Selatan, yang selama ini dikuasai penduduk dan penguasa Muslim, tampaknya telah menjadi pilihan ideal bagi mereka yang ingin melanjutkan perjuangan membangun Kekhalifahan Islam dari wilayah terdekat. Mereka tidak perlu harus melakukan *jihad* jauh ke Timur-Tengah, yang semakin sulit ditembus medannya akibat kontrol di setiap perbatasan negara yang kian ketat. Untuk menghadapi perkembangan yang buruk di lapangan ini, para pengikut dan pendukung ISIS di Asia Tenggara telah diserukan untuk *hijrah* ke Filipina Selatan.

Hapilon sebagai pemimpin Kelompok Abu Sayyaf, sering melakukan pembajakan kapal dan penculikan warga asing, yang diikuti aksi pemenggalan, jika tidak dipenuhi keinginannya memperoleh uang tebusan untuk mendukung aktivitas organisasinya. Sejak tahun 2014, aksi-aksi Hapilon mendapat respons lebih hebat dari militer Filipina, setelah ia berbaiat pada ISIS/IS pusat. Sejak itu, tidak hanya Hapilon secara simbolik menjadi penting eksistensi dan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ "Kota Marawi, Tak Ada Lagi Kedamaian," *Kompas*, 31 Mei 2017: 8.

¹⁹ Watts, 2017, *loc.cit.*

²⁰ "KBRI di Filipina akan Pulangkan 16 WNI," *Media Indonesia*, 30 Mei 2017: 2.

²¹ Sukma Loppies, "Milisi Asing Ikut Berperang di Marawi," *Koran Tempo*, 3-4 Juni 2017: 3.

²² "Krisis Mindanao: Kehadiran Milisi Asing Bukti Ancaman NIIS," *Kompas*, 2 Juni 2017: 1 & 15.

²³ Sidney Jones, Direktur IPAC, Jakarta, dalam Paddock, *ibid.*

perannya sebagai tokoh teroris di kawasan, tetapi Filipina Selatan menjadi pusat kampanye militer Filipina, dan perhatian pemerintah di kawasan Asia Tenggara, karena kian banyak tersebar kelompok-kelompok teroris yang berbaiat pada ISIS, termasuk Kelompok Maute.

Secara realistis dewasa ini, Kelompok Abu Sayyaf telah berkembang dari sebelumnya sebagai gerakan separatis menjadi pengusung *jihād* di Filipina Selatan. Di pertengahan dasawarsa 1990, kelompok ini berafiliasi secara longgar kepada Al-Qaeda. Aksi-aksi terorismenya beragam, dan terus berkembang, mulai dari penculikan, pembunuhan, pemboman kapal *ferry* di tahun 2004, dan bus di Manila tahun 2005. Pemerintah Filipina dengan bantuan AS, pasca-Peristiwa 9 September 2001, telah berupaya mengeliminasi pemimpin Kelompok Abu Sayyaf. Namun, kemudian muncul pemimpin baru, sampai Hapilon, dengan kemampuannya membangun solidaritas dengan kelompok-kelompok militan Muslim lainnya di Filipina. Ia telah dianggap sebagai “*Emir*” kelompok militan Muslim di Filipina Selatan, dan dengan mengatasnamakan kepentingan ISIS, melalui serangan terorisme ke Kota Marawi, Hapilon dan Kelompok Maute berupaya menaikkan pamor mereka.²⁴

Akibat perannya yang kian membahayakan, Departemen Kehakiman AS, telah mengumumkan Hapilon sebagai “teroris yang sangat dicari” di dunia dewasa ini, dengan harga kepalanya US\$ 5 juta.²⁵ AS memiliki dendam khusus dengannya, karena ia dianggap bertanggungjawab atas aksi penculikan di tahun 2001, yang menyandera 20 orang, seorang di antaranya WN AS, yang kemudian dipenggal. Ketidakmampuan Pemerintah Filipina menekan dan mengeliminasi Kelompok Hapilon, Maute dan lain-lain telah mengundang kekuatiran negara tetangganya, termasuk Australia. Karena itulah, pada Februari 2017, Menlu Julie Bishop telah mengungkapkan kesiapan negaranya untuk segera merespon pendeklarasian “Kekhalifahan ISIS di Filipina Selatan.”

Ketika serbuan kelompok teroris pro-ISIS Maute ke Marawi, Filipina Selatan, berlangsung, terdapat 7 WNI oleh Kepolisian Filipina diperkirakan terlibat jejaringan dan aktivitas terorisme ISIS/IS di Kota Marawi. Dua dari mereka diidentifikasi berasal dari Jawa Barat. Adapun 4 orang telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian Nasional Filipina, karena telah bergabung dalam milisi

Maute, yang telah berafiliasi ke ISIS/IS.²⁶ Keempat WNI itu diduga adalah anggota Jamaah Ansharut Daulah Khilafah Nusantara (JADKN), pengikut Aman (Oman) Abdurrahman. Sisanya merupakan anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT).²⁷

Mereka masuk secara legal ke Filipina Selatan antara Nopember 2016 serta Maret dan April 2017. Kecuali 1 orang yang sudah tewas, keberadaan mereka tidak diketahui pasca- dimulainya operasi militer yang diperintahkan Presiden Filipina, Duterte. Mereka memang tidak masuk dalam daftar anggota jaringan teroris yang tengah diburu aparat antiteroris Indonesia (Densus 88),²⁸ namun bukan berarti, lepas dari perhatian aparat keamanan Indonesia dan pasukan antiterorisnya. Sebab, jika melarikan diri kembali ke wilayah Indonesia, baik melalui wilayah perbatasan maupun tidak, akan menimbulkan persoalan di kemudian hari di Indonesia, membawa ideologi dan pengalaman terorisme mereka di Filipina Selatan.

Perkembangan terakhir mengungkap keterlibatan lebih banyak WNI. Polri mengumumkan terdapat 37 laki-laki dan 1 perempuan terlibat aktivitas jejaring terorisme pro-ISIS di Kota Marawi, Filipina, yang sedang berperang dengan militer negeri itu. Sebanyak 4 orang dari mereka diduga telah tewas, 6 sudah kembali ke Indonesia, 6 lainnya dideportasi Pemerintah Filipina, sedangkan 22 orang masih di Filipina.²⁹ Ke-38 WNI itu masuk ke Filipina secara ilegal. Sementara, aktivitas ke-12 orang yang sudah kembali ke Indonesia itu tengah didalami dan terus dipantau.³⁰

Bersama dengan aktivitas Kelompok Abu Sayyaf lainnya yang meningkat belakangan ini di Laut Sulu dengan aksi-aksi pembajakan kapal dan penyanderaan mereka, wilayah Kepulauan Sulu menjadi pilihan sebagai pusat-pusat perlawanan baru ISIS di Asia Tenggara. Ini merupakan konsekuensi dari kebijakan divergensi ISIS di tingkat pusat. Adapun Perairan Sulu terletak tidak jauh dari perbatasan Indonesia-Filipina di Pulau Miangas. Dalam serangan ke Kota Marawi pada 23 Mei 2017 lalu, aparat keamanan Filipina telah mencatat keterlibatan milisi asing (FTFs), antara lain berkewarganegaraan Arab Saudi, Chechnya, Yaman, Malaysia dan Indonesia. Keberadaan FTFs di Kota Marawi ini mengindikasikan telah dijadikannya wilayah negara Filipina sebagai

²⁶ “Krisis Mindanao: Kehadiran Milisi Asing Bukti Ancaman NIIS,” *Kompas*, 2 Juni 2017, *loc.cit*.

²⁷ Al-Chaidar dalam, “Patroli Batas Sulut-Filipina Makin Ketat,” *Manado Post*, 2 Juni 2017: 1 & 11.

²⁸ *Ibid*.

²⁹ “Konflik Marawi: 38 WNI Terlibat Terorisme di Filipina,” *Koran Jakarta*, 3-4 Juni 2017: 1.

³⁰ “Empat WNI Tewas di Marawi,” *Manado Post*, 3 Juni 2017: 1 & 11.

²⁴ Jake Maxwell Watts, “Clashes Escalate in Southern Philippines,” *The Wall Street Journal*, May 25, 2017: 1 & A2.

²⁵ *Ibid*.

basis operasi ISIS/IS, sebagaimana telah diantisipasi Presiden Duterte sebelumnya. Keterlibatan orang-orang Maute dalam bisnis narkoba memberikan mereka sumber dana baru yang potensial, di samping dana operasional yang bersumber dari aksi-aksi pembajakan kapal, penculikan orang asing dan permintaan tebusan uang.³¹

B. Dampak Filipina Selatan Ke Miangas

Pasca-serbuan aksi-aksi terorisme Kelompok Maute yang pro-ISIS ke Kota Marawi, yang diikuti dengan operasi militer yang digelar Pemerintah Filipina, ratusan aparat Polda Sulawesi Utara (Sulut) telah disiagakan di wilayah-wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud dengan perairan Filipina Selatan. Wilayah perbatasan Indonesia dengan Filipina ini sangat rawan, karena di sana terdapat sebanyak 168 pulau di wilayah terluar Provinsi Sulawesi Utara, dalam lingkup Kabupaten Kepulauan Talaud. Sedangkan dalam lingkup Kabupaten Kepulauan Sangihe terdapat 105 pulau, yang ditambah lagi dengan pulau-pulau di Kabupaten Sitaro (Siau, Tahulandang, dan Bairo) sebanyak 47 pulau.³² Pulau terdepan, yakni Miangas, adalah yang paling rawan, karena letaknya sejajar dengan dan jaraknya hanya 48 mil laut dari bagian terluar Kepulauan Mindanao di Filipina Selatan.

Untuk mengantisipasi larinya para pengikut ISIS dari Kota Marawi dan sekitarnya di wilayah Filipina Selatan, dan mencegah masuknya para FTFs baru, Polda Sulut telah menugaskan aparat kepolisiannya di tiga Polsek (Kepolisian Sektor) yang wilayah tugas dan tanggung jawabnya berbatasan langsung dengan wilayah Filipina. Mereka, terutama aparat Polisi, telah diperintahkan untuk mengawasi dengan seksama para nelayan yang keluar-masuk wilayah perbatasan ini. Langkah ini diambil untuk mencegah FTFs lama dan baru keluar-masuk menggunakan wilayah perairan kedua kabupaten kepulauan tersebut. Sedangkan aparat TNI-AL telah diperintahkan untuk menggelar operasi patroli keamanan maritim meliputi wilayah perairan 3 provinsi sekaligus, meliputi Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Maluku Utara.

Sejalan dengan itu, aparat TNI-AU telah diperintahkan melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan secara seksama dari udara, terutama di atas wilayah perbatasan di Pulau Miangas, Marore, dan Marampit. Sebanyak 17 pesawat dikerahkan untuk gelar "Operasi Kilat Badik 17," memantau

dan mengawasi wilayah itu selama 6 jam sehari. Sementara, di darat, aparat TNI-AD melakukan pengawasan secara ketat di daerah wilayah darat di bagian pulau-pulau terluar. Sebanyak 119 personil Brimob telah ditempatkan di pintu masuk 3 pulau terluar Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara, namun terdekat dengan Filipina, yaitu Miangas, Marore, dan Nanusa.³³

Pada waktu penelitian lapangan dilakukan, tampak kesibukan aparat Polri dan TNI yang datang dari pusat dan kabupaten terdekat, ke Miangas. Dari pusat ada aparat intelijen, juga aparat Poltri dan TNI teritorial terdekat, yakni asal Kodim Santiago, ibukota Melonguane. Mereka berupaya memantau dan mengikuti perkembangan dari wilayah terdepan untuk mengumpulkan data terkini dari pemantauan langsung di lapangan. Temuan lapangan terpenting mengungkap tidak adanya Polisi Air dan Bakamla (Badan Keamanan Laut) yang melakukan tugas operasi pemantauan dan pengintaian lebih jauh (*reconnaissance*) di Kecamatan Kepulauan Miangas.³⁴ Realitas ini tidak memungkinkan aparat penegak hukum dari kepolisian melakukan penangkapan, jika menemukan mereka yang dicurigai sebagai teroris. Jika aparat lain, misalnya TNI-AL dan TNI-AD, yang melakukan penangkapan orang yang diduga teroris yang berusaha masuk dari kawasan pesisir dan masih di (tengah) laut, akan memunculkan tuduhan pelanggaran kewenangan hukum, mengingat revisi UU Antiteroris di DPR belum selesai dilakukan. Sementara, dilaporkan, kawasan pesisir di Miangas merupakan tempat masuk teroris dari berbagai wilayah di Filipina Selatan, termasuk mereka yang berniat melarikan diri dari tekanan operasi militer Filipina di Marawi.³⁵

Terlepas dari kemungkinan ini, setelah serangan terorisme pro-ISIS oleh Kelompok Maute di Marawi, jelas sekali tampak, dari observasi di lapangan, telah terjadinya peningkatan yang drastis perhatian pemerintah pusat dan provinsi terhadap (perkembangan) situasi di Miangas. Mobilitas aparat yang datang dan keluar untuk melakukan pengamatan atas situasi yang berkembang dan menyampaikan laporan keadaan. Dilaporkan, di lapangan sejak meningkatnya ancaman keamanan laut dari para teroris yang melakukan pembajakan kapal dan menculik ABK, pihak TNI-AL dari pusat, melakukan kegiatan pemantauan rutin lapangan dengan EFQR (*East Fleet Quick Response*)-nya, yang

³¹ "Krisis Mindanao: Kehadiran Milisi Asing Bukti Ancaman NIIIS," *Kompas*, 2 Juni 2017: 1 & 15.

³² "Cegah Teroris, Polisi dan TNI Siaga di Perbatasan," *Suara Pembaruan*, 31 Mei 2017: 18.

³³ Nicky Aulia Widadio, "38 WNI Terlibat Teror di Marawi," *Media Indonesia*, 3 Juni 2017: 1.

³⁴ Wawancara dengan Bripka W.A. Essing, aparat kepolisian Polsek Miangas, di Bandara Miangas, pada 4 Juni 2017.

³⁵ Sriwani Adolong dan Grand Regar, "Wilayah Pesisir Rawan Disusupi Teroris," *Manado Post*, 3 Juni 2017: 5.

bisa menjangkau perairan laut lepas di perbatasan perairan Indonesia-Filipina.³⁶ Di luar itu, juga ada pengiriman aparat baru yang melakukan pengamatan secara temporer, untuk waktu singkat maupun lebih lama, sebagai pasukan organik. Mereka adalah personil marinir dari AL dan Lanal Melongguane, aparat teritorial dari Kodim Santiago dan Brimob dari kepolisian (Polri).

Juga, untuk merespon perkembangan yang buruk di Filipina Selatan, tampak kesibukan pengiriman perlengkapan aparat dengan menggunakan pesawat sipil yang ada, mengingat alutsista angkutan udara TNI-AU amat terbatas.³⁷ Pesawat Hercules mobilitasnya sangat terbatas, karena harus berkeliling dulu untuk melayani kebutuhan militer di wilayah Indonesia lainnya secara efektif, sebelum bisa melayani pemenuhan kebutuhan pengiriman alutsista TNI di Kabupaten Kepulauan Miangas. Terlepas dari keterbatasan ini, pada 14 Juni 2016, ada pesawat Hercules tiba di bandara Miangas, yang biasanya ramai pada hari Minggu saja, yang membawa petinggi dari Kodam Merdeka, Manado. Hal ini menjelaskan, sekarang Miangas telah menjadi pusat perhatian nasional, dari semula yang sepi dan tidak ada yang mau peduli, akibat "Peristiwa Marawi" dan upaya pembangunan Kekhalifahan Islam di Filipina Selatan.

C. Ketahanan Masyarakat Miangas

Jarak Miangas yang jauh dari kantor-kantor pemerintah pusat dan daerah adalah problem utama, yang menyebabkan masyarakat pulau itu terisolasi selama ini. Penduduk pada umumnya masih hidup belum sejahtera, sebagian besar hidup dari melaut sebagai nelayan musiman, yang sangat tergantung pada iklim dan cuaca. Mereka tidak punya profesi lain, selain membuat kopra dengan pohon kelapa yang semakin habis ditebang untuk bangun jalan ke bandara. Luas lahan yang dapat ditanami di pulau terluar yang kecil itu, sekitar 6 kilometer persegi, amat terbatas.

Seringkali penduduk yang mencoba beternak, gagal, karena kurang ketersediaan lahan yang mendukung dan bencana banjir akibat degradasi lingkungan dan cuaca yang tidak menentu. Kondisi ketahanan ekonomi warga rendah, pemenuhan bahan kebutuhan pokok penduduk masih sangat tergantung pada distribusi pengiriman dari pelabuhan Bitung, yang membutuhkan waktu sekitar seminggu. Kondisi harga-harga pada umumnya 2 kali lipat dari

di Jakarta dan ibukota Provinsi Sulawesi Utara, yakni BBM Rp. 20 ribu dan semen mencapai Rp. 95 ribu, ayam kampung Rp. 200 ribu, dan beras sekarang isi 15 kilogram Rp. 250 ribu.³⁸ Infrastruktur listrik kondisinya minim, tergantung pada kondisi alam, generator, dan ketersediaan solar. Sedangkan listrik bersumber dari tenaga matahari sangat terbatas, karena jaringan infrastruktur dan instalasinya amat minim terdapat.

Kantor-kantor (dinas) pemerintah ada, namun belum ditempati, sehingga banyak yang kosong dan terancam rusak. Pegawainya jarang masuk, kantor kecamatan seringkali dijumpai dalam keadaan kosong, walaupun pintunya terbuka dan lampu menyala. Peralatan kerja tidak lengkap, semua data masih dicatat dan disimpan secara manual, dan tidak terintegrasi secara *online* (daring) ke Pemkab dan Pemprov, apalagi ke Pemerintah Pusat. Bendera Merah Putih, yang dikibarkan di depan Kantor Kecamatan di pular terdepan NKRI itu sudah robek-robek di bagian pinggirnya.

Diversifikasi pangan tidak diperkenalkan kepada penduduk Miangas, sehingga penduduk bergantung sepenuhnya pada makanan pokok beras. Mereka perlu disadarkan pentingnya mengonsumsi makanan pokok laluga dan sagu tanah, juga pisang, kelapa, dan lain-lain, yang banyak terdapat di sana, serta lebih berserat dan lebih rendah kandungan gulanya. Penduduk perbatasan di Pulau Miangas begitu tergantung pada makanan pokok beras yang mahal, sementara beras harus selalu dikirim dari Pelabuhan Bitung, dengan praktek pungli yang tinggi. Dampak buruk lainnya akibat introduksi kebijakan yang keliru adalah mulai banyak penduduk yang obesitas dan terkena penyakit degeneratif, seperti diabetes, darah tinggi, jantung, terkena *stroke* dan lain-lain. Munculnya kemalasan penduduk untuk berjalan kaki karena mulai marak menggunakan motor, padahal jarak satu tempat ke tempat lainnya di Pulau Miangas ini tidak jauh, menambah resiko semakin meluasnya penyakit degeneratif itu di masa depan.

Tentu saja menggembirakan, jika penduduknya yang mayoritas non-Muslim tidak bisa diajak kerja sama untuk memasukkan senjata dan membantu kegiatan subversif, yang merongrong negara sendiri dan juga tetangga. Karena itu, mereka, terutama para teroris yang ingin keluar-masuk secara ilegal dan ingin menyelundupkan barang, mesiu dan senjata dari Filipina dan ke Indonesia, atau sebaliknya, lebih memilih akses dari pulau-pulau yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Sangihe, terutama melalui

³⁶ Wawancara dengan Letkol Maftukin, Danlanal Melongguane, di Bandara Miangas, pada 4 Juni 2017.

³⁷ Wawancara dengan Mayor (Inf) S.W. Panaha, dari Kodim Santiago Melongguane, di Bandara Miangas, pada 4 Juni 2017.

³⁸ Wawancara dengan keluarga Ibu Hermina dan Kres Talu di rumah keluarga di Pulau Miangas, pada 4-5 Juni 2017.

Pulau Tinakarang (Matutuang), ke dan dari Pulau Tibanban di Filipina, daripada Kabupaten Kepulauan Talaud.³⁹

Jalur pelayarannya pun tampak lebih mudah dan aman bagi para teroris, karena banyak bisa dilakukan persinggahan dan persembunyian, jika terlacak aparat keamanan dan militer Indonesia. Sementara, jalur pelayaran Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud, pulau-pulau sekitarnya yang dapat digunakan untuk persinggahan, hanya sedikit. Jalur laut membutuhkan paling sedikit 5 jam dengan *speedboat* dari Pulau Miangas ke pelabuhan Melongguane di ibukota kabupaten, dan lebih lama lagi, sekitar 2-3 malam, dengan kapal perintis, dan 2 minggu dengan kapal perintis ke Pelabuhan Bitung. Sedangkan menggunakan jalur transportasi udara harus menunggu seminggu sekali pesawat yang ada, karena memang cuma tersedia satu penerbangan, sekali dalam seminggu, yang sebagian besar diisi aparat negara yang melakukan perjalanan dinas. Mengingat aktivitas (para pelaku) bisnis serta transportasi laut dan udara begitu tinggi di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangir, sedangkan kapasitas dan alat kerja aparat pengawas keamanan di Kabupaten Kepulauan Talaud amat terbatas, tidak mengherankan, kegiatan penyelundupan manusia dan barang, termasuk yang ingin membawa masuk senjata dan bahan peledak, juga lebih rawan terjadi di sana.⁴⁰

D. Kesiapan Aparat Miangas Merespon Ancaman Terorisme

Kantor Kecamatan selalu ditemukan dalam keadaan kosong, tanpa kehadiran pegawai ASN setempat. Dari sisi kesejahteraan, Aparat ASN di Kantor Kecamatan Miangas tidak seperti polisi, baik yang organik maupun nonorganik, yang menerima tunjangan perbatasan secara penuh.⁴¹ Tanpa perbaikan kesejahteraan, mentalitas dan loyalitas mereka rawan terganggu dan tidak tanggap terhadap ancaman keamanan yang berkembang di sekitarnya dan akan datang ke wilayahnya. Pemberian tunjangan perbatasan dibutuhkan, karena harga-harga bahan pokok di wilayah perbatasan Indonesia berkali lipat dari ibukota provinsi dan ibukota negara, Jakarta.

Kepala administrasi pemerintahan daerah di Pulau Miangas, yang berfungsi sebagai penghubung kepentingan Pemprov dan Pemkab, yaitu Camat, tidak tinggal di Pulau Miangas. Sungguh

mengherankan, Camat tinggal di ibukota kabupaten, yaitu Melongguane, yang membutuhkan pesawat untuk datang ke Kecamatan Pulau Miangas. Ini merupakan salah satu konsekuensi negatif, jika Camat ditunjuk dan diangkat oleh Bupati. Ia lebih peduli pada Bupati daripada warga yang harus diperhatikan dan diurusinya. Tentu saja, memiliki Camat dari tengah-tengah warga dan tinggal bersama mereka menjadi jauh lebih baik, sebab setiap waktu, bisa diminta tanggungjawabnya terkait perkembangan di lapangan. Sebaliknya, dengan Camat dari luar Pulau Miangas, ini menciptakan pemborosan APBD dan APBN.

Adapun masalah yang dihadapi prajurit TNI di Miangas adalah kurangnya dukungan kesejahteraan. Uang tunjangan prajurit TNI yang bertugas di daerah perbatasan amat minim, karena alokasi dari APBN hanya ada untuk 5 prajurit, yang harus dibagi rata dengan anggota Koramil lainnya. Sementara, harga bahan kebutuhan pokok⁴² cukup tinggi, karena harus ditunggu 2 minggu sekali kirimannya dengan kapal *ferry* dari Pelabuhan Bitung. Pada musim angin kencang dan ombak tinggi selama 3 bulan, Pulau Miangas terisolasi, tidak ada kapal masuk membawa kebutuhan logistik dari Pelabuhan Bitung, sehingga prajurit Koramil (AD) dan Posal (AL) yang bertugas, tidak mempunyai beras sama sekali untuk dimakan, kecuali makan laluga, sagu tanah dan lain-lain. Karena itu, perlu peningkatan kesejahteraan prajurit selekasnya, agar pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka terpenuhi. Jika tidak tercukupi, mereka sulit berkonsentrasi atau fokus pada tugas pokok dan fungsinya, dan akan mudah tergoda untuk melakukan segala kegiatan yang melanggar hukum, seperti menyelundupkan BBM, terlibat dalam *illegal fishing*, melakukan pungli terhadap nelayan Miangas yang baru memperoleh tangkapan ikan, menerima suap, dan lain-lain, yang bertentangan dengan tujuan keberadaan mereka untuk mengamankan pulau terluar paling Utara NKRI itu.

Praktek meminta uang ("oleh-oleh"), yang dilaporkan dilakukan oknum TNI dan polisi terhadap warga Pulau Miangas yang baru datang dari urusan bisnis di luar wilayahnya dikeluhkan warga dan telah berdampak pada terhentinya kerja sama penangkapan ikan nelayan Filipina dan Indonesia di pulau itu. praktek premanisme oknum TNI dan Polri ini telah merugikan penghasilan nelayan kedua negara, sehingga mereka tidak berminat lagi untuk melanjutkan kerja sama. Inisiatif kerja sama dalam kerangka *Border Crossing Agreement* (BCA) itupun sudah berakhir. Begitu pula, dengan inisiatif baru lewat gereja, yakni ajakan nelayan Filipina

³⁹ Wawancara dengan Gerson Pogo, Kepala Kantor Bea-Cukai, di rumah pribadi, di Pulau Miangas, pada 8 Juni 2017.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Wawancara dengan Rosana Sari, Anista Papea, dan Osboren Lantaa, ASN Kantor Kecamatan Khusus Miangas, di Kantor Kecamatan Khusus Miangas, pada 6 Juni 2017.

⁴² Wawancara dengan Danramil Miangas, Mayor (Inf) Sonny Saerang, di Bandara Miangas, pada 4 Juni 2017.

untuk kembali bekerja sama mencari ikan di Pulau Mingas dengan nelayan pulau itu, telah dibatalkan. Penduduk Miangas tidak dapat mencapai kata setuju akibat masih trauma dengan perilaku preman oknum aparat Polri dan TNI di masa lalu, yang telah memotong hasil panen ikan mereka secara kontinu, sehingga sangat merugikan.⁴³ Padahal, eksistensi aparat Polri dan TNI adalah untuk meningkatkan ketahanan Pulau Miangas, serta melindungi dan mempertahankannya, dari segala bentuk ancaman aktivitas infiltrasi, invasi, dan aksi-aksi terorisme, termasuk dari ancaman teroris pro-ISIS/IS, dari dalam maupun luar wilayah, terutama asal Filipina Selatan.

Terkait penguatan satuan tempur wilayah, penempatan secara permanen pasukan marinir setingkat pleton, dengan markas komando mereka dekat Posal, sudah harus dilakukan. Ini menjadi penting, karena satuan tempur marinir terdekat, posnya ada di tingkat provinsi, yakni di Pelabuhan Bitung. Jadi, keberadaan Batalyon Marinir di Bitung terlalu jauh jaraknya. Sedangkan kekuatan infantri AD yang ada, yakni 10 personil di Koramil, kapasitas dan karakter kerjanya terbatas dan berbeda. Juga, pengiriman prajurit marinir dari Batalyon Marinir di Bitung membutuhkan waktu sekitar 1 ½-2 jam untuk dapat digelar menghalau musuh yang melakukan infiltrasi dan serangan bersenjata secara diam-diam dan menyebar di wilayah Pulau Mingas, seperti teroris pro-ISIS yang ingin mendirikan basis pertahanan dan penyerangan baru di luar wilayah Filipina Selatan.

Sebelumnya, di tahun 2012-2013, pernah ditempatkan 1 regu batalyon marinir untuk tugas teritorial menjaga perbatasan dalam kerangka kerja sama dengan militer Filipina. Sayang sekali, hal itu bersifat insidental saja, tidak berlanjut, sehingga markas mereka yang cukup besar, sudah berdiri dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, ditinggalkan begitu saja, dan sudah mulai rusak. Sementara, jika dilanjutkan, akan baik sekali untuk terus membantu tugas pemantauan dan penjagaan wilayah pesisir secara kontinu, tanpa harus menunggu konflik berintensitas rendah, antara militer Filipina dengan kelompok separatis dan teroris Abu Sayyaf, Moro, Maute dan lain-lain, mengalami eskalasi dan menimbulkan dampak ke Pulau Miangas.

Situasi dan respons yang kontradiktif ditemui dalam penelitian di lapangan. Komandan Posal tidak berada di tempat, selama seminggu meninggalkan posnya ke Lanal Melongguane. Sementara, keadaan di Filipina Selatan semakin tidak kondusif, dan telah dinyatakan dalam

⁴³ Wawancara dengan Pendeta Anugerah, putera daerah setempat, tokoh Gereja Miangas, di rumah keluarga Kres Talu dan Ibu Hermina di Pulau Miangas, pada 9 Juni 2017.

kondisi darurat oleh Presiden Filipina Duterte. Seharusnya Danposal, yang memegang tanggung jawab utama atau penjamin fasilitasi keamanan maritim dan pesisir di wilayah Pulau Miangas, tidak boleh meninggalkan posnya demi merespon eskalasi konflik dan situasi yang memburuk di wilayah Filipina Selatan. Komandan setingkat di atasnya, yakni Komandan Pangkalan AL (Danlanal), seharusnya tidak boleh mengizinkan Danposal dalam situasi kritis itu. Ini beralasan, sebab jarak Pulau Miangas ke Melongguane berlipat lebih jauh daripada jarak Pulau Miangas ke Saint Agustine, wilayah terdekat Indonesia dengan Filipina Selatan.

Fungsi intelijen dan teritorial pun tampaknya tidak dilaksanakan dengan tepat di lapangan oleh aparat Polri (Brimob) dan TNI. Mereka lebih sering berkumpul dan patroli di tengah-tengah desa dan lewat depan rumah-rumah penduduk --sesuatu yang tidak mungkin dilakukan para teroris pro-ISIS/IS, jika mau melakukan infiltrasi ke Pulau Miangas! Seharusnya, mereka membuat basis dan melakukan pengintaian di sepanjang pantai dan pesisir Pulau Miangas, terutama di wilayah-wilayah yang tersembunyi, dan jauh dari penglihatan penduduk lokal dan aparat keamanan. Warga lokal Pulau Miangas sendiri sesungguhnya telah memiliki daya koherensi, integritas dan kesetiaan yang tinggi pada NKRI, mengingat selama ini tidak pernah muncul aspirasi dan tuntutan separatisme. Latarbelakang agama dan etnik warga Pulau Miangas yang berbeda dengan para pengikut dan pendukung Kelompok Abu Sayyaf, Maute dan kelompok-kelompok pro-ISIS/IS lainnya, tentu saja menyulitkan para teroris itu untuk bisa menyusup, menyelinap dan tinggal di tengah-tengah warga lokal.

Seruan pemimpin informal masyarakat lokal melarang masyarakat untuk tidak melaut dan tinggal di rumah saja, untuk memudahkan aparat keamanan mencegah dan menindak teroris masuk, tampak ganjil.⁴⁴ Seruan itu menjadi kontraproduktif, karena merefleksikan cara kerja aparat keamanan yang akan menimbulkan ketakutan ataupun sinisme warga. Warga lokal sebenarnya dapat digunakan sebagai mata dan telinga aparat keamanan dalam menjalankan fungsi intelijen untuk operasi pencegahan dan kontraterorisme di Pulau Miangas.

E. Kesiapan Aparat Menghalau Teroris

Di Pulau Miangas, tidak ada alutsista yang ditempatkan di sana untuk membantu prajurit TNI mengawasi dan menjaga keamanan wilayah kedaulatan, terutama perairan, dari infiltrasi para aktor non-negara pengganggu keamanan, yaitu

⁴⁴ Wawancara dengan Gerson Pogo, Kepala Kantor Bea-Cukai, yang juga warga asli (lokal) Pulau Miangas, di depan Posal Pulau Miangas, pada 8 Juni 2017.

teroris pro-ISIS. Pasukan organik terbatas, kecuali yang *mobile* dan bertugas bergantian secara periodik dari pusat dan ibukota provinsi. Pos-pos tentara seharusnya diperlengkapi dengan senjata artileri ringan, seperti roket, granat peluncur roket, mortir dan sebagainya. Sebab, kekuatan kelompok-kelompok teroris pro-ISIS/IS yang berbasis di Filipina Selatan diperlengkapi dengan kapal-kapal cepat (*speedboat*) penyerang, dengan senjata-senjata berat dan artileri ringan. Seorang prajurit penghubung AL Filipina, Edgar Catamco, yang bertugas di Badan Kerjasama Perbatasan RI-Filipina, yang diposkan di Miangas dalam 2 tahun belakangan, sangat heran dengan kondisi aparat dan kelengkapan sistem pertahanan-keamanan di Miangas.⁴⁵ Pos pengamatan dan pertahanan yang terbatas jumlah dan kondisinya, menurutnya, akan sulit dapat merespons setiap ancaman dan serangan langsung dari kelompok-kelompok teroris pro-ISIS/IS di Filipina Selatan, yang jauh lebih siap dan berpengalaman tempur di perairan.

Kapal patroli, yang merupakan alat kerja utama mereka, untuk mengawasi area sepanjang garis pantai dan pesisir, tidak dimiliki aparat keamanan dan militer di Pulau Miangas. Aparat hanya memiliki 1 perahu karet, yang sudah rusak terhempas gelombang dan batu karang besar. Tidak tersedianya pesawat pengintai nirawak, atau *drone*, lebih melemahkan pelaksanaan fungsi intelijen aparat keamanan dan militer di Pulau Miangas, yang seharusnya sudah dapat diadakan, sesuai dengan janji kampanye Joko Widodo waktu Pilpres beberapa tahun lalu. Pengadaan kapal-kapal patroli cepat untuk pengawasan wilayah perbatasan, dan juga *drone*, seharusnya lebih diprioritaskan, mengingat lebih mendesak diperlukan dan efisien ketimbang pembukaan kembali Kodam Merdeka secepatnya di Provinsi Sulawesi Utara.

Polsek Miangas, sebagai aparat penyidik hukum terhadap kelompok sipil yang dicurigai sebagai teroris, memiliki kelemahan tidak memiliki *database*, yang bisa dibuat terintegrasi dengan Polda dan Mabes Polri, serta dengan BNPT dan Densus 88.⁴⁶ Keberadaan *database* ini penting, karena sangat berperan membantu koordinasi di lapangan dalam pencegahan dan juga penindakan segala bentuk kegiatan terorisme sedini mungkin. Dengan kondisi ini, kemampuan intelijen untuk pemantauan, pencegahan, penindakan, dan pengawasan lebih lanjut atas aktivitas para terduga

dan pelaku, pendukung, dan simpatisan terorisme masih sangat lemah. Sementara, jika mengandalkan kapasitas intelijen yang non-organik, atau bersifat insidental, tidak permanen, akan menyulitkan aparat dalam membuat respons yang terukur dan tepat. Sebaliknya, jika kegiatan intelijen dapat dilakukan secara kontiniu dan dilengkapi kantor yang permanen, alat yang canggih serta personil yang cakap dan memadai, kemampuan intelijen untuk pencegahan dan penindakan dapat diperbaiki secara signifikan.

Organisasi, kekuatan personil dan alat kerja Polsek Miangas juga sangat terbatas.⁴⁷ Mereka tidak punya satuan Polisi Air dan kapal-kapal pengawasnya yang bisa mengawasi garis pantai yang panjang dan kawasan pesisir yang luas di Pulau Miangas. Kondisi ini kontras sekali dibandingkan dengan aparat kepolisian di wilayah kepulauan bukan perbatasan, yang dilengkapi dengan satuan Polisi Air dan alat kerjanya, yaitu kapal-kapal cepat dan alutsistanya. Keberadaan kapal-kapal cepat ini penting sekali, karena teroris asal Filipina Selatan yang terdesak operasi militer Pemerintah Filipina akan mencari tempat yang lepas dari pengawasan untuk dijadikan basis perlindungan baru.

Adapun kawasan pesisir jarang didiami penduduk, sehingga rawan sebagai tempat pelarian dan persembunyian teroris asal Filipina Selatan. Para teroris pro-ISIS, selalu berupaya mengincar kapal-kapal sipil dan komersial untuk dibajak dan disandera, untuk dimintai uang tebusan bagi pendanaan operasi terorisme mereka selanjutnya. Jadi, operasi kontraterorisme oleh aparat Polsek dan Brimob non-organik dari Polda, dengan patroli untuk pengawasan atas warga asing yang masuk, dengan gelar pasukan di tengah-tengah pedesaan dan pemukiman penduduk, tidaklah tepat. Sebab, penduduk Miangas minim jumlahnya, dan hidup memusat dalam sebuah desa yang berlokasi di tengah kampung, yang dapat saling mengontrol anggota komunitasnya, yang tidak beragam, saling kenal, dan dekat hubungan kekerabatannya.

Menempatkan pasukan nonorganik Polri, dan juga TNI, di tengah-tengah pedesaan, selain kurang relevan dengan kebutuhan realistik di lapangan menimbulkan efek psikologis kurang baik dalam jangka panjang. Karena, penduduk yang sedikit di wilayah yang kecil itu menjadi merasa diawasi terus. Sementara, mentalitas aparat kepolisian dan militer yang berbeda, apalagi jika kebutuhan penunjang kegiatan kerja tidak terpenuhi, dalam jangka panjang, dapat menyebabkan munculnya gesekan dengan masyarakat lokal. Sehingga, agar aparat

⁴⁵ Wawancara dengan Sersan Kepala Edgar Catamco, anggota AL Filipina penghubung Kerjasama Perbatasan RI-Filipina, di Pelabuhan Miangas, pada 4 Juni 2017.

⁴⁶ Wawancara dengan Bripka Sandro Tale, Kaunit Reskrim Polsek Miangas, di Mapolsek Miangas, pada 6 Juni 2017.

⁴⁷ *Ibid*; juga, wawancara dengan Bripka W.A. Essing, aparat Polsek Miangas, di Bandara Miangas, pada 4 Juni 2017.

kontraterorisme dapat menjalankan tupoksi mereka dengan baik, konsentrasi mereka harus digeser untuk mengawasi kawasan yang paling rawan, dan tidak lagi di pusat desa. Itu artinya, pengadaan kapal-kapal patroli cepat untuk mengawasi seluruh garis pantai dan sudut wilayah pesisir, harus segera direalisasikan. Ini tidak bisa menunggu lagi, karena perkembangan lingkungan strategis membutuhkannya.

Eksistensi Posal Miangas sebagai markas penindak aktivitas terorisme lintas-negara di perbatasan Indonesia-Filipina, tidak dilengkapi alat kerja yang memadai, yakni tanpa radar pemantau posisi kapal dan perlengkapan *Global Positioning System* (GPS) yang canggih. Karena itu, daya dan kapasitas intelijennya amat terbatas, tergantung pada cara manua,l yang hanya mengandalkan kemampuan indera manusia.⁴⁸ Perahu karet untuk merapat ke wilayah pesisir dan daratan harus banyak dimiliki aparat keamanan dan harus baik kondisinya. Kapal-kapal dan perahu-perahu karet itu juga harus dilengkapi dengan tempat tambat kapal di pelabuhan, agar kesiapan dan mobilitas kapal dan perahu di Posal Miangas tidak lambat dan terbatas. Jika kondisi dibiarkan, prajurit TNI-AL di Posal sulit dapat merespon dengan cepat ancaman terorisme dari para aktor non-negara yang berasal dari wilayah perairan di perbatasan Filipina Selatan.

Filipina Selatan yang terus bergolak akibat meningkatnya kegiatan separatisme bersenjata dan aksi-aksi terorisme yang menyertainya dapat menciptakan dampak limpahan ke Pulau Miangas, akibat infiltrasi para pengikut Kelompok Abu Sayyaf dan FTFs, yang mungkin masuk secara diam-diam (menyelinap) melalui sepanjang pantai dan pesisir pulau terluar itu. Seluruh aparat negara sudah harus menyadari keberadaan Pulau Miangas sebagai pulau terluar di perbatasan dengan perairan Filipina Selatan, dapat terancam kelompok teroris pro-ISIS dari Filipina Selatan. Apalagi eksistensi Kelompok Abu Sayyaf dan Kelompok Maute selama ini telah diidentifikasi sebagai kelompok teroris itu pro-ISIS, yang hendak mendirikan "Kekhalifahan Asia Tenggara."

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di tengah kegembiraan Presiden Duterte Filipina atas direbutnya kembali Kota Marawi dari tangan ISIS, tetap muncul peringatan bahwa kekuatan pengikut dan pendukung ISIS akan mencari wilayah lain untuk menyebarkan gagasan perjuangan dan pengaruh, serta melanjutkan perjuangan mereka. Mindanao

dan perairan Sulu, serta wilayah Filipina Selatan lain yang belum berhasil dikontrol sepenuhnya oleh otoritas pusat selama beberapa dasawarsa pergolakan separatisme di sana, merupakan benteng pertahanan terakhir ISIS di kawasan Asia Tenggara. Letak wilayah itu yang berbatasan langsung dengan perbatasan laut di Pulau Miangas karenanya logis memberikan implikasi langsung ke wilayah paling Utara Indonesia itu. Kerawanan secara alamiah atau geografis dan ketidaksiapan aparat di sana, sebagai konsekuensinya, membuat tingkat ancaman yang datang dari pengikut dan pendukung ISIS di wilayah Filipina Selatan secara menyeluruh menjadi lebih besar.

Tanpa menyadari kelemahan ini dan upaya memperbaikinya, sangat mudah bagi para pengikut ISIS yang melarikan diri untuk melakukan infiltrasi dan mendirikan *safe house* di sekitar wilayah pesisir perairan Pulau Miangas, yang luput dan kurang dari kontrol aparat keamanan setiap waktu akibat kurangnya tanggung jawab, disiplin dan alutsista yang tersedia. Kemenangan militer Filipina di Kota Marawi seharusnya tidak membuat aparat keamanan Indonesia yang menjaga Pulau Miangas menjadi santai dan lengah, serta semakin lemah tanggung jawab dan disiplin mereka. Sebaliknya, seharusnya, potensi kekuatan penduduk yang ada di sana, dimanfaatkan secara optimal oleh aparat untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja mereka, sehingga setiap upaya pengikut ISIS mencari dan menjadikan tempat-tempat di Pulau Miangas sebagai *safe houses* dan *safe haven* secara luas, dengan memanfaatkan kelemahan aparat disana, dapat ditangkal.

Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk melindungi Pulau Miangas dari ancaman ISIS dewasa ini. Memperbaiki konektivitas pulau ini dengan pulau-pulau lainnya di Kabupaten Talaud adalah yang utama harus dilakukan, dengan pembangunan dan perbaikan infrastruktur pelabuhan dan telekomunikasi, serta penyediaan kebutuhan dasar penduduk dan alutsista aparat keamanan dan pertahanan di sana. Perbaikan mentalitas kerja dan disiplin aparat secara komprehensif dan simultan juga harus dilakukan, dengan pemberian sosialisasi dan penanaman kesadaran yang lebih baik atas bahaya ancaman yang ada dari wilayah seberang atau tetangga, yang tidak jauh letaknya dan dapat dilihat secara langsung daratannya dari Pulau Miangas, dewasa ini. Sebab, kesiapan yang lebih baik dengan koreksi di berbagai bidang dan kebijakan akan menentukan respons yang tepat dan sekaligus efektif dalam menghadapi setiap ancaman yang datang kapanpun. Jika tidak, bukan tidak mungkin, Pulau Miangas dan

⁴⁸ Wawancara dengan Serka Buntomo Sampe prajurit Posal Miangas, di Posal Miangas, pada 6 Juni 2017.

wilayah perairan di sekitarnya dapat menjadi pilihan para pengikut dan pendukung ISIS di Filipina Selatan untuk dijadikan sebagai tempat persembunyian alternatif, sekaligus perluasan basis militer mereka di kawasan Asia Tenggara. Eksistensi basis ISIS di wilayah ini, jika dapat diperluas dan diperkuat akan mendukung basis perlawanan mereka secara signifikan di pusat (Timur-Tengah), yang dewasa ini semakin tersudut serangan gencar pasukan koalisi Barat pimpinan AS serta juga Rusia, Iran dan rezim Assad.

B. Saran

Dengan luas wilayah yang kecil, hanya sekitar 6 kilometer persegi, dan jumlah penduduk yang sedikit, hanya sekitar 800 orang (204 KK), serta gambaran latarbelakang etnik dan agama serta modal sosial yang mereka miliki, tugas aparat keamanan sebetulnya telah menjadi lebih mudah untuk menjalankan fungsi pemantauan dan kegiatan intelijen. Jadi, aparat keamanan perlu semakin mendekatkan diri dengan warga, dengan sering berkomunikasi langsung dengan mereka dan hadir secara langsung di tengah-tengah masyarakat. Sehingga, mereka dapat dibantu warga lokal dengan sukarela, untuk dapat mengetahui secara cepat dan kontiniu perkembangan dari lapangan, dari waktu ke waktu, mengenai aktivitas kelompok-kelompok teroris di sekitar wilayah perbatasan perairan Indonesia dengan Filipina Selatan tersebut. Sebab, kapasitas dan alutsista aparat keamanan, dan juga pertahanan, yang menjaga Pulau Miangas sangat terbatas.

Pemerintah pusat dan provinsi perlu ditekan, terutama oleh parlemen, untuk meningkatkan pendekatan kesejahteraan di pulau-pulau terluar, tidak hanya bertumpu pada pendekatan keamanan. Karena, sukses mempertahankan kedaulatan NKRI secara utuh tergantung pada dilaksanakannya pendekatan keamanan secara simultan dengan pendekatan kesejahteraan. Keamanan wilayah tidak akan tercipta tanpa kesejahteraan penduduk lokal dan aparat negara penjaganya. Sedangkan kesejahteraan warga tidak bisa berlangsung lama dan dapat terancam, jika wilayahnya tidak terjaga dengan aman. Kedua hal atau pendekatan tersebut jelas saling bergantung satu sama lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abimayu, Bambang (2006). *Teror Bom Azahari-Noor Din*. Jakarta: Penerbit Republika.
- Acharya, Amitav (2012). *The Making of Southeast Asia: International Relations of a Region*. Singapore: ISEAS.
- Agus SB (2014). *Merintis Jalan Mencegah Terorisme*. Jakarta; Semarak Lautan Warna.
- Adjie S (2005). *Terorisme*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Alexander, Yonah and Dean Alexander (2015). *The Islamic State: Combating the Caliphate without Borders*. London: Lexington Books.
- Ali, As'ad Said (2014). *Al-Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya*. Jakarta: LP3ES.
- Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani (2011), *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Assad, Muhammad Haidar (2014). *ISIS: Organisasi Teroris Paling Mengerikan Abad Ini*. Jakarta: Zahira.
- Berman, Eli (2011). *Radical, Religious, and Violent: The New Economics of Terrorism*, Massachusetts, MIT Press.
- Buzan, Barry (1991). *People, States & Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*, 1991, The University of Michigan, Harvester Wheatsheaf.
- Djelantik, Sukawarsini (2010). *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Golose, Petrus Reinhard (2009). *Deradikalisasi Terorisme*. Jakarta: YPKIK.
- Heijmans, Annelies, Nicola Simmonds, and Hans van de Veen (2014). *Searching for Peace in Asia Pacific: An Overview of Conflict Prevention and Peacebuilding Activities*. London, Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Jemadu, Aleksius (2014). *Politik Global dalam Teori dan Praktek*, Edisi 2, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jones, David Martin (2004). *Globalisation and the New Terror: The Asia Pacific Dimension*. Cheltenham: Edward Elgar.

- Kahfi, Syahdatul (2006). *Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi*. Spectrum.
- Kleinen, John and Manon Osseweijer (2010). *Pirates, Ports, and Coasts in Asia: Historical and Contemporary Perspectives*. Singapore: ISEAS.
- Lister, Charles R (2015). *The Syrian Jihad*. Oxford: Oxford University Press.
- Mabon, Simon (2016). *Saudi Arabia and Iran: Power and Rivalry in the Middle East*. London and New York: IB Tauris.
- McRae, Dave (2015). *Poso: Sejarah Komprehensif Kekerasan Antar Agama Terpanjang di Indonesia Pasca-Reformasi*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Nicholson, Michael. (1998) *International Relations*, London: Macmillan Press Ltd.
- Neumann, Peter R (2013). *Options and Strategies for Countering Online Radicalization in the United States*. London: King's College.
- Nye, Jr., Joseph S (2003). *Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History*. New York: Longman.
- Samuel, Thomas Koruth (2016). *Radicalisation in Southeast Asia: A Selected Case Study of Daesh in Indonesia, Malaysia, and the Philippines*, Malaysia: SEARCCT.
- Simonsen, Clifford E. and Jeremy R. Spindlove (2004). *Terrorism Today: The Past, the Players, the Future*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Singh, Daljit (2009). *Terrorism in South and Southeast Asia in the Coming Decade*. Singapore: ISEAS.
- Smelser, Neil J. and Faith Mitchell (eds.) (2001). *Terrorism: Perspectives from the Behavioral Science*. Washington DC: The National Academies Press.
- Snowden, Lynne L. and Bradley C. Whitsel (2005). *Terrorism: Research, Readings, and Realities*. New Jersey: Prentice Hall.
- Stern, Jessica (2003). *Terror in the Name of God: Why Religious Militant Kills*. New York: Harper Collins.
- Stern, Jessica and J.M. Berger (2015). *ISIS: The State of Terror*. Ecco; William and Collins.
- Viotti, Paul R. dan Mark V. Kauppi (1993), *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*, Second Edition, Massachusetts: Allyn and Bacon.
- Wahid, Abdul, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik (2004). *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Whitaker, David J (2004). *Terrorist and Terrorism in the Contemporary World*. London: Routledge.
- White, Jonathan R (2012). *Terrorism and Homeland Security*. USA: Wadsworth.

Jurnal

- Gunaratna, Rohan (2016). "Islamic State branches in Southeast Asia," Pacific Forum, CSIS, Number 7, 19 January 2016.
- Jones, David Martin; Smith, M L R (2012). "Organization vs. Ideology: The Lessons from Southeast Asia." *Current Trends in Islamist Ideology*, Vol. 12. Washington DC: Hudson Institute: 92-123.
- Kim, Hyung Jong and Lee, Poh Ping (2011). "The Changing Role of Dialogue in the International Relations of Southeast Asia." *Asian Survey* (Sept/Oct), 51.5. Berkeley (Sep/Oct): 953-970.
- Li, Wei (2015). "Near ISIS Threat – Islamic State of Iraq and al-Sham seeks to extend its presence to Central Asia and beyond," *Beijing Review*, Beijing.
- Ramakrishna S, Kumar (2017). "The Growth of ISIS Extremism in Southeast Asia: Its Ideological and Cognitive Features—and Possible Policy Responses," *New England Journal of Public Policy*, Volume 29, Issue 1, Article 6, Singapore: Nanyang Technological University, 2017.
- _____. (2016). "Reflections of a Reformed Jihadist: The Story of Wan Min Wan Mat." *Contemporary Southeast Asia*, 38.3. Singapore: 495-522.
- Thayer, Carlyle A (2016). "Southeast Asia's Regional Autonomy under Stress." *Asian Affairs*." Singapore: ISEAS: 3-18.